

BAB II

DINAMIKA PENYELENGGARAAN JAMBORE PRAMUKA INTERNASIONAL 2023 DI KOREA SELATAN

Jambore dilatarbelakangi oleh pemikiran Baden Powell yang tertuang dalam buku ‘AIDS TO SCOUTING’ pada 1889 berdasarkan pengalamannya selama bertugas di Afrika dan India saat Perang Boer berlangsung, dengan tujuan untuk membantu para tentara Inggris bertahan hidup di alam bebas. Idenya kemudian diuji kembali bersama para pemuda *Boys Brigade* dan melahirkan buku ‘SCOUTING FOR BOYS’ pada 1908 yang sampai saat ini menjadi dasar gerakan pramuka. Secara internasional, pertemuan ini disebut *World Scout Jamboree* dan dilaksanakan pertama kali di Olympia, London, Inggris pada tahun 1920 dengan 34 dihadiri oleh 34 negara. Sejak saat itu, Jambore Pramuka Internasional diadakan selama 4 empat tahun sekali di berbagai negara. Jambore ditujukan untuk mempererat persaudaraan antar anggota dan sarana pertukaran budaya antar negara. Dengan tujuan dasar sebagai sarana meningkatkan keterampilan, kerja sama tim, dan keterampilan hidup. Pelaksanaan mega-event seperti Jambore Pramuka Internasional memiliki peran signifikan sebagai wadah promosi budaya dan pariwisata. Sejalan dengan pemikiran Choi & Kim (2014) bahwa acara internasional merupakan media untuk memperkuat *nation branding* negara tuan rumah di panggung global.

2.1 Jambore Pramuka Internasional 2023

Jambore Pramuka Internasional ke-25 merupakan acara tahunan terbesar bagi anggota Gerakan Pramuka. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 1 hingga 12 Agustus 2023 di Saemangeum, Jeolla Utara, Korea Selatan (World Organization of the Scout Movement, 2023). Tema yang diusung tahun ini adalah “Draw Your Dream” dengan tujuan untuk memotivasi peserta untuk mengejar mimpi mereka sambil belajar dan berbagi melalui aktivitas kolaboratif.

Kawasan Saemangeum menawarkan ruang terbuka, seluas 8,84 km² yang cocok untuk kegiatan besar. Area ini menawarkan pemandangan pantai dan akses ke Taman Nasional Byeonsanbando (The Korea Times, 2023). Dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal untuk kegiatan berkelanjutan, pemilihan area ini sejalan dengan misi lingkungan yang dituju Jambore Pramuka Internasional.

Jambore Pramuka Internasional ke-25 dihadiri oleh lebih dari 43.000 peserta dari 158 negara, termasuk anggota Pramuka remaja, pembina pendamping, tim pelayanan internasional (International Service Team atau IST), serta pengunjung dan relawan lokal (World Organization of the Scout Movement, 2023). Aktivitas yang ditawarkan dalam acara ini mencakup petualangan di alam terbuka, pembelajaran teknologi, proyek keberlanjutan, dan seni budaya. Beberapa kegiatan yang ditawarkan adalah Taekwondo dan pembuatan kerajinan Hanji (kertas tradisional) sebagai Upaya mengenalkan seni tradisional Korea (Seoul Metropolitan Government, 2023). Melalui acara ini, para peserta diberikan peluang untuk berinteraksi dengan berbagai budaya.

Jambore Pramuka Internasional fokus pada keterampilan hidup seperti kepemimpinan, manajemen waktu, dan membangun kerjasama tim. Tujuannya untuk mempromosikan nilai-nilai kepramukaan seperti tanggung jawab, solidaritas, dan keberanian menghadapi tantangan (WOSM, 2023). Jambore Pramuka Internasional ke-25 menjadi salah satu sarana yang digunakan WOSM untuk mempromosikan program berbasis keberlanjutan dan partisipasi pemuda dalam isu global seperti program *Scouts for SDGs*.

Peserta mengikuti kegiatan edukatif dan interaktif yang mendorong keterlibatan positif dalam isu pembangunan berkelanjutan seperti diskusi, workshop, dan aksi berbasis komunitas yang melibatkan kolaborasi dengan organisasi global seperti UNICEF dan WHO (WOSM, 2023). Ini sejalan dengan agenda global PBB menuju Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 mengenai *Quality Education*, dan SDG 17 mengenai *Partnerships for the Goals*. Secara tidak langsung, kegiatan ini juga berkaitan dengan upaya peningkatan kesadaran terhadap isu keberlanjutan seperti perubahan iklim (SDG 13) dan konsumsi yang bertanggung jawab (SDG 12) (Rahul & Mishra, 2025; United Nations, 2015).

Walau telah terencana dengan baik, kegiatan ini menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan Jambore Pramuka Internasional ke-25 adalah cuaca ekstrem yang datang bersamaan dengan Topan Khanun yang melanda kawasan tersebut. Semua peserta dievakuasi pada 8 Agustus 2023 ke tempat yang lebih aman seperti pusat konvensi dan stadion di kota-kota terdekat. Evakuasi ini melibatkan pemerintah Korea Selatan dalam bentuk

bantuan transportasi dan perlindungan darurat bagi para peserta (Yim & Shin, 2023). Meskipun proses evakuasi berjalan dengan lancar, penyelenggara menerima kritik dari berbagai pihak atas ketidaksiapan mereka menghadapi kondisi ekstrem ini (Park, 2023). Penting bagi Korea Selatan untuk meredam kritik yang semakin memburuk di media. Namun sebelum membahas mengenai upaya yang dilakukan Korea Selatan dalam menghadapi situasi ini, perlu adanya identifikasi lebih mendalam mengenai indikator penting guna memahami akar permasalahan yang menyebabkan ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan Jambore Pramuka Internasional 2023.

2.2 Indikator yang Memengaruhi Permasalahan Jambore Internasional 2023

Adanya kelemahan dalam pelaksanaan acara besar seperti Jambore 2023 menunjukkan kurangnya persiapan penyelenggara dalam perencanaan acara. Faktor krusial yang memengaruhi adalah logistik yang tidak memadai, manajemen risiko yang buruk, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Getz bahwa infrastruktur dan sumber daya perlu dipersiapkan agar suatu acara dapat berhasil. Kemampuan manajemen untuk mengelola risiko dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan juga dipertimbangkan (Getz, 1997). Karena ketidaksiapan ini, Jambore 2023 yang seharusnya menjadi wadah pertukaran budaya malah mendapatkan perhatian negatif yang menyoroti kelemahan dalam manajemen acara.

2.2.1 Manajemen Risiko yang Buruk

Manajemen risiko merupakan komponen utama dalam sebuah acara berskala besar. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mengelola risiko akan berdampak pada keamanan, kenyamanan, serta kelangsungan acara. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam manajemen risiko, yaitu pendekatan reaktif dan proaktif. Pendekatan reaktif fokus terhadap pengelolaan risiko setelah terjadi insiden, sehingga acara yang menggunakan pendekatan ini akan lebih responsif saat menghadapi krisis. Sebaliknya, pendekatan proaktif memerlukan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan untuk menghindari gangguan selama pelaksanaan acara (Angkiriwang, Pujawan, & Santosa, 2014).

Dalam literatur manajemen risiko, pendekatan proaktif yang berfokus pada pencegahan secara tidak langsung dianggap lebih unggul, efektif dan berkelanjutan dalam jangka Panjang dibandingkan dengan pendekatan reaktif yang bersifat responsif. Hal ini sejalan dengan pandangan Julia dalam *Risk Management for Meetings and Event* yang menyebutkan bahwa manajemen risiko harus terintegrasi sejak tahap perancangan dan dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang proses penyelenggaraan (Sivers, 2008, pp. 3-4).

Salah satu kesalahan penyelenggara Jambore Internasional 2023 adalah tidak adanya langkah pencegahan yang matang. Pernyataan ini sesuai dengan laporan independent dibawah WOSM yang mencatat adanya “*significant shortcoming in planning, monitoring and overall management*” sehingga berdampak pada keterlambatan respons terhadap permasalahan di lapangan

(Independent Review Panel, 2024). Sebelum mulainya acara, badan meteorologi telah memperkirakan gelombang panas yang berpotensi membahayakan kesehatan peserta. Namun penyelenggara tidak mengambil langkah mitigasi berupa fasilitas yang memadai dan menyebabkan banyak peserta mengalami dehidrasi dan serangan panas. Pemerintah dan panitia baru meningkatkan fasilitas berupa tenaga medis, ambulan, dan pendingin setelah banyaknya peserta yang jatuh sakit (Rashid, 2023).

Selain risiko cuaca, aspek lingkungan dan lokasi juga tidak dipertimbangkan secara matang dalam perencanaan. Jambore 2023 diadakan di Saemangeum, area reklamasi yang masih dalam tahap pengembangan dan memiliki medan yang kurang stabil. Studi menunjukkan bahwa lahan reklamasi seperti Saemangeum umumnya memiliki komposisi tanah yang heterogeny dan kurang stabil, sehingga memerlukan analisis dan mitigasi khusus dalam Pembangunan infrastruktur (Won, Sadiq, Kim, & Choi, 2025). Selain itu, perubahan sistem hidrologi akibat proyek reklamasi juga menyebabkan ketidakstabilan lingkungan, termasuk gangguan sirkulasi air dan dinamika pesisir (Lie, et al., 2008).

Meski terdapat risiko lingkungan dan cuaca yang tidak pasti, penyelenggara tidak membangun infrastruktur dengan baik, sehingga ketika kondisi memburuk, peserta menghadapi masalah logistik yang memengaruhi kenyamanan dan keselamatan mereka. Kurangnya strategi berbasis data dan analisis yang kuat dapat memperburuk kesiapan penyelenggara dalam menghadapi tantangan yang dapat diantisipasi sejak awal. Maka dari itu, penting untuk menyelaraskan manajemen resiko dengan kedua pendekatan proaktif dan reaktif.

2.2.2 Kurangnya Kesiapan Infrastruktur dan Logistik

Infrastruktur dan logistik merupakan komponen krusial untuk kelancaran operasional acara. infrastruktur yang buruk dapat menurunkan kenyamanan dan meningkatkan risiko keamanan. Permasalahan infrastruktur dan logistik yang muncul dalam penyelenggaraan Jambore Internasional 2023 menunjukkan lemahnya perencanaan dan koordinasi penyelenggara yang memperburuk pengalaman peserta.

The government's Audit Board in a report found a 'complete lapse in all aspects of management including lack of competency and awareness of the organisers exacerbated by poor execution of work led to the failure of the Saemangeum Jamboree. (Kim, 2025)

Menurut laporan yang dikutip Reuters, permasalahan yang muncul dalam Jambore 2023 disebabkan oleh kelemahan menyeluruh dalam manajemen acara. Pemilihan lokasi yang belum memadai serta buruknya kesiapan fasilitas dan logistik menyulitkan aksesibilitas menuju lokasi. Saemangeum merupakan kawasan reklamasi yang belum sepenuhnya berkembang sehingga infrastruktur transportasi yang ada belum optimal. Ketika Jambore 2023 berlangsung, proyek transportasi utama dikawasan tersebut masih dalam pembangunan (Saemangeum Development and Investment Agency). Hal ini turut memengaruhi mobilitas peserta dan distribusi logistik. Di samping itu, lokasi perkemahan yang berada di area reklamasi menjadi tantangan tersendiri karena medan yang tidak stabil dan kurangnya sistem drainase menyebabkan genangan air dan lumpur saat hujan turun.

"We arrived around lunchtime. It was a day later than planned – we were told the camp wasn't ready yet and there had been heavy rains, with nowhere for the water

to drain off. When we got there, there was confusion about whether to set up our tents because we were in a red zone, meaning that if it rained we would be flooded. Eventually we moved to an orange zone.” (Bartholomew, 2023)

Saat berjalannya acara, muncul masalah infrastruktur lainnya. Minimnya fasilitas seperti toilet dan tempat mandi menyebabkan antrean panjang di jam-jam sibuk. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya air bersih di lokasi acara. Dikutip dari The Korea Times, salah satu peserta mengeluhkan fasilitas sanitasi yang minim. Tidak adanya tempat mandi untuk pria dewasa bahkan setelah tiga hari acara berlangsung. Selain itu, dikatakan bahwa beberapa fasilitas dalam kondisi yang kotor serta banyak serangga dan kutu (Jun, 2023). Buruknya kondisi sanitasi dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit akibat lingkungan yang tidak higienis.

Minimnya stok air bersih dan fasilitas pendingin ditengah suhu yang tinggi menyebabkan banyak peserta mengalami dehidrasi dan kelelahan. Reuters melaporkan bahwa pemerintah Korea Selatan bahkan harus mengerahkan truk air dan bus berpendingin udara setelah banyak peserta terkena dampak cuaca panas ekstrem (Yim & Kim, 2023).

Pos kesehatan yang tersedia mengalami tekanan besar akibat meningkatnya jumlah peserta yang mengalami gangguan kesehatan karena cuaca ekstrem dan gelombang panas. Yonhap melaporkan bahwa 108 peserta dibawa ke rumah sakit dalam satu hari akibat gangguan kesehatan terkait panas, sementara The Guardian mencatat bahwa sedikitnya 400 peserta membutuhkan penanganan medis untuk gejala seperti pusing, kelelahan, dan dehidrasi selama kegiatan berlangsung (Yoo C.-M. , 2023; Rashid, 2023).

Kurangnya kesiapan infrastruktur dan logistik dalam Jambore 2023 tidak hanya berdampak pada kelancaran acara, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan dan keamanan peserta. Ketidakefektifan dalam pengelolaan transportasi, akomodasi, dan sanitasi mencerminkan lemahnya perencanaan yang dilakukan penyelenggara. Selain itu, keterbatasan infrastruktur ini turut memperburuk kondisi keamanan acara, terutama dalam hal pengendalian kerumunan dan respons terhadap keadaan darurat.

2.2.3 Minimnya Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang kompeten dan terlatih menjadi faktor penting dalam menyelenggarakan acara besar. Masalah yang terjadi di Jambore Internasional 2023 muncul akibat kurangnya tenaga profesional. minimnya pelatihan bagi panitia dan relawan, serta koordinasi yang lemah dalam pengelolaan SDM menyebabkan berbagai kendala yang berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan peserta. Dalam audit terbaru, pemerintah Korea Selatan menemukan panitia penyelenggara lebih banyak diisi oleh personil yang minim pengalaman dalam menangani acara internasional besar (Kim, 2025).

Selain itu, laporan media Korea menunjukkan bahwa panitia mengalami kekurangan staf sejak sebelum acara dimulai. Asia Business melaporkan terjadi pemangkasan jumlah staf, rencana jumlah panitia adalah 298 staf yang kemudian dibatasi menjadi 106 dan pada praktiknya hanya 79 pegawai yang aktif bekerja selama persiapan acara (Seungsop & Joonyi, 2023).

Akibatnya, beberapa bidang penting seperti transportasi, drainase, listrik, dan penanganan gelombang panas tidak memadai jumlah personel yang memadai dan hanya ditangani oleh dua staf. Kondisi ini menyebabkan lemahnya pengawasan, lambatnya respons terhadap krisis, serta buruknya koordinasi logistik selama kegiatan berlangsung.

Rendahnya kesiapan SDM dalam Jambore 2023 menunjukkan aspek ini perlu menjadi perhatian kedepannya. penting untuk memastikan terdapat tenaga kerja ahli yang cukup dan terlatih agar permasalahan operasional dapat diatasi dengan efektif.

2.2.4 Keamanan yang Tidak Memadai

Keterbatasan jumlah staff yang tidak sebanding dengan jumlah peserta berdampak pada sektor keamanan. Minimnya tenaga keamanan dan protokol tanggap darurat yang kurang jelas menyebabkan kelemahan dalam perencanaan sistem keamanan, pengelolaan kerumunan, serta respons terhadap keadaan darurat yang berdampak buruk terhadap keselamatan peserta.

Kelemahan dalam pengelolaan kerumunan menjadi sorotan dalam penyelenggaraan Jambore 2023. Acara ini menghadirkan ribuan peserta dalam satu lokasi perkemahan yang luas, namun tidak ada strategi yang jelas dalam mengatur pergerakan peserta di dalam area acara. Hal ini menyebabkan kepadatan berlebih di beberapa titik, terutama di fasilitas sanitasi, pusat distribusi makanan, serta area acara utama. Studi oleh Tange (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan jalur akses

yang buruk dan kurangnya petugas pengatur kerumunan berkontribusi pada meningkatnya risiko kecelakaan dan insiden akibat desakan peserta.

Protokol tanggap darurat yang kurang terlihat sejak sebelum acara dimulai. Peserta harus menghadapi tenda yang tergenang air, toilet meluap, serangan panas, hingga munculnya penyakit yang disebabkan serangga. Bahkan sebelum munculnya perintah evakuasi akibat munculnya topan khanun, badan kependuan dunia telah meminta pemerintah mencari cara untuk mengakhiri acara tersebut lebih awal (Rashid, 2023).

Several scouts and their parents have shared their ordeals with local media, some describing instances of being served spoiled eggs for breakfast, having to camp on muddy grounds and enduring the absence of fans, let alone air conditioners, despite a heat wave. (Sung Eun, 2023)

Selain risiko keamanan fisik, masalah dalam penyediaan makanan dan minuman juga menjadi perhatian. Beberapa peserta melaporkan bahwa makanan yang mereka terima dalam kondisi buruk. Hal ini menyebabkan risiko keracunan makanan serta penyebaran penyakit di antara peserta. Kurangnya pengawasan terhadap standar keamanan pangan ini menunjukkan bahwa penyelenggara tidak memiliki mekanisme yang ketat dalam mengawasi distribusi konsumsi peserta, yang seharusnya menjadi bagian dari strategi keamanan secara keseluruhan.

Kurangnya kesiapan dalam aspek keamanan ini berkaitan erat dengan permasalahan logistik dan infrastruktur yang telah dibahas sebelumnya. Keterbatasan fasilitas sanitasi, distribusi makanan yang buruk, serta kurangnya jalur evakuasi yang memadai semakin memperburuk situasi di lapangan. Tanpa sistem

keamanan yang baik, risiko keselamatan peserta meningkat secara signifikan, yang berdampak langsung pada pengalaman mereka serta citra penyelenggara.

2.2.5 Manajemen Keuangan yang Tidak Efektif

Manajemen keuangan yang tidak efektif menjadi salah satu faktor buruknya penyelenggaraan Jambore Internasional 2023. Meskipun acara ini mendapatkan dukungan dana yang besar dari pemerintah dan sponsor, alokasi anggaran yang tidak efisien serta lemahnya pengawasan terhadap pengeluaran menyebabkan banyak fasilitas esensial tidak terpenuhi dengan baik.

Anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung kebutuhan utama peserta, seperti penyediaan tenda yang layak, sanitasi yang cukup, serta distribusi makanan dan air yang merata, ternyata lebih banyak diarahkan ke operasional yang tidak relevan (Dong Woo, 2023). Akibatnya, banyak peserta menghadapi kondisi perkemahan yang minim fasilitas dasar.

Dikutip dari Yonhap, sekitar 74 persen anggaran (87 miliar Won) digunakan untuk menutupi biaya personel dan biaya operasional terkait perjalanan, makanan, dan konser K-pop untuk Jambore. 20,5 won untuk infrastruktur termasuk air, sanitasi, dan pendingin. serta 13 miliar won untuk pengeluaran seperti tempat mandi dan dispenser minum.

Dalam laporan yang sama, dilaporkan bahwa terdapat perjalanan mewah menteri kesetaraan gender selaku penanggung jawab bersama keluarga dengan dalih penelitian untuk Jambore. Pada Mei 2018 lima pejabat provinsi melakukan kunjungan ke Swiss dan Italia mencakup Interlaken, Lucerne, Milan, dan Venesia

meskipun kedua negara ini tidak memiliki pengalaman menyelenggarakan Jambore. Desember 2018 pejabat lain dari pemerintah provinsi mengunjungi Australia, dan pada tahun 2019, pejabat dari kementerian kesetaraan gender dan pemerintah provinsi melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menghadiri Jambore Pramuka Sedunia ke-24 yang diadakan di West Virginia. Perjalanan ini juga mencakup program kapal pesiar yang sama sekali tidak terkait dengan Jambore Pramuka Sedunia (Dong Woo, 2023).

Pengawasan terhadap penggunaan dana dalam Jambore Internasional 2023 dinilai sangat lemah. Berdasar laporan media dan hasil audit, sebagian besar anggaran lebih banyak digunakan untuk biaya operasional dan perjalanan dinas dibandingkan pembangunan fasilitas dasar bagi peserta. Selain itu, berdasarkan laporan media terdapat permasalahan administratif dan koordinasi operasional termasuk ketidaksiapan logistik dan ketidakjelasan pembiayaan kepada pihak eksternal

Manajemen keuangan yang tidak efektif membuat jambore 2023 kekurangan jumlah tenaga kerja. Rencana perekrutan tenaga kerja dipangkas dari yang sebelumnya 298 orang menjadi 106 orang. Alokasi anggaran yang buruk dan upah minimum yang rendah memengaruhi perekrutan tenaga kerja profesional. Pada akhirnya, jumlah tenaga yang terisi adalah 79 orang dengan tingkat kekosongan 25,4% (Seungsop & Joonyi, 2023).

Permasalahan administratif dan lemahnya pengelolaan keuangan tidak hanya memengaruhi kualitas layanan selama acara berlangsung tapi juga merusak reputasi penyelenggara di mata mitra bisnis. Padahal sebenarnya, dalam manajemen

acara, hubungan atas dasar kepercayaan dan profesionalisme menjadi faktor penting dalam mempertahankan kerja sama dan memperoleh dukungan pada penyelenggaraan acara berikutnya (Lewis, 2021). Selain itu, kegagalan dalam menjaga transparansi keuangan memperkuat persepsi negatif terhadap acara ini, yang semakin diperburuk oleh kritik media dan opini publik yang kurang puas dengan jalannya acara. Penting bagi penyelenggaraan event internasional di masa depan, di mana transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan eksekusi acara.

2.2.6 Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Lemah

Keberhasilan sebuah acara berskala besar seperti Jambore Internasional 2023 bergantung pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dapat menyebabkan banyak masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan acara. (Drakeley, 2022). Minimnya keterlibatan dari pihak-pihak yang seharusnya mendukung acara dapat berdampak langsung pada berbagai aspek operasional, termasuk infrastruktur, logistik, keamanan, dan manajemen keuangan.

Salah satu permasalahan utama dalam penyelenggaraan Jambore 2023 adalah lemahnya koordinasi dan keterlibatan antar kepentingan. Menurut *The Board of Audit and Inspection* (BAI) terdapat kelemahan kolektif yang disebabkan oleh empat pemangku kepentingan utama: Komite Penyelenggara Jambore sebagai penanggungjawab persiapan dan pelaksanaan, Kementerian Kesetaraan Gender sebagai lembaga pengawas, Provinsi Jeolla Utara sebagai tuan rumah, serta

Kementerian Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan sebagai pengawas reklamasi lahan melalui badan usahanya (Gyu-tae, 2025). Lemahnya koordinasi antara para pemangku kepentingan mengakibatkan persiapan acara tidak berjalan dengan optimal dan muncul berbagai kendala logistik.

World Organization of the Scout Movement (WOSM) sebagai badan utama kegiatan Pramuka dunia mengalami kendala koordinasi dengan pemerintah Korea Selatan. Dalam laporan KBS World menunjukkan bahwa WOSM merasa dikesampingkan setelah pemerintah Korea Selatan mengambil alih sebagian besar penyelenggaraan acara. Panitia penyelenggara acara yang sebagian besar adalah PNS mengalami pergantian staf berulang kali sehingga penyerahan tugas menjadi tidak jelas (KBS World, 2024).

Secara keseluruhan, lemahnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam Jambore 2023 menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah acara tidak hanya bergantung pada perencanaan teknis, tetapi juga pada sejauh mana kolaborasi dan komunikasi dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga acara dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi semua pihak yang terlibat.

2.2.7 Sistem Komunikasi Informasi yang Buruk

Dalam era digital, teknologi dapat mendukung kelancaran acara berskala besar, terutama dalam aspek komunikasi, logistik, dan manajemen data. Namun, dalam Jambore Internasional 2023, operasional ini tidak digunakan secara optimal.

Laporan KBS World menyebut bahwa terdapat miskomunikasi antara kementerian dan pihak penyelenggara (KBS World, 2024). Kurangnya koordinasi menyebabkan peran dan tanggung jawab staff menjadi tidak jelas sehingga struktur pelaksanaannya menjadi lemah.

Hasil audit pemerintah Korea Selatan menunjukkan bahwa fasilitas komunikasi di lokasi Jambore tidak memadai untuk mendukung penyelenggaraan acara internasional berskala besar. Audit tersebut menyebut bahwa “communication equipment” bersama fasilitas dasar lainnya berada dalam kondisi “insufficient and inadequate,” yang memperlihatkan lemahnya kesiapan infrastruktur dan manajemen operasional selama acara berlangsung (Kim, 2025).

Selain itu, dalam platform pribadi beberapa peserta mengalami kesulitan memperoleh informasi yang jelas terkait perubahan agenda, proses evakuasi, dan pengaturan kegiatan selama Jambore berlangsung. Beberapa peserta bahkan lebih mengandalkan sumber informasi dari pihak eksternal dibanding sistem resmi panitia. Situasi ini menunjukkan kurangnya kesiapan sistem komunikasi dan manajemen informasi dalam Jambore 2023.

2.3 Dampak dari Jambore 2023 terhadap Reputasi Korea Selatan

Permasalahan dalam Jambore Internasional 2023 tidak hanya berpengaruh bagi penyelenggara, tetapi juga berdampak luas terlebih bagi reputasi jangka panjang pemerintah. Berbagai permasalahan yang muncul selama acara menyebabkan ketidakpuasan peserta serta kritik dari negara-negara anggota yang mengirimkan delegasi mereka. Selain itu, liputan media yang luas turut

memperburuk citra penyelenggara dan menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan Korea Selatan sebagai tuan rumah acara berskala internasional di masa mendatang.

2.3.1. Aspek Sosial

Penyelenggaraan Jambore Internasional 2023 tidak hanya berdampak pada operasional acara, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan yang luas. Kurangnya perencanaan yang matang dalam berbagai aspek, mulai dari fasilitas dasar hingga mekanisme mitigasi risiko, mengakibatkan pengalaman negatif yang membekas bagi pihak yang terlibat.

Banyak peserta merasa bahwa fasilitas yang disediakan jauh dari standar yang dijanjikan, terutama dalam hal ketersediaan air bersih, sanitasi, dan tempat berteduh yang memadai. Antrean panjang untuk toilet dan minimnya akses terhadap air minum menjadi salah satu keluhan utama. Kondisi ini diperburuk dengan suhu ekstrem yang melanda Korea Selatan selama acara berlangsung, yang mengakibatkan banyak peserta mengalami kelelahan akibat panas serta dehidrasi.

Selain itu, ketidaksiapan dalam memberikan informasi yang jelas terkait perubahan jadwal dan kondisi darurat menyebabkan kebingungan di kalangan peserta. Dalam banyak kasus, peserta harus mencari informasi sendiri melalui media sosial atau dari sesama peserta karena sistem komunikasi resmi yang tidak berjalan optimal. Kurangnya komunikasi responsif membuat peserta merasa ditinggalkan dalam situasi yang tidak menentu. Keadaan ini menimbulkan kesan bahwa Korea Selatan gagal menjamin keselamatan dan kenyamanan peserta selama acara berlangsung.

Masyarakat lokal sendiri mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mengelola acara. Dugaan penyalahgunaan anggaran serta buruknya koordinasi antar lembaga memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

2.3.2. Aspek Respon Negara

Respon dari berbagai negara terhadap Jambore Internasional 2023 mencerminkan ketidakpuasan luas atas buruknya manajemen acara serta kegagalan penyelenggara dalam memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan peserta. Delegasi Inggris menjadi salah satu yang pertama menarik kontingennya dari lokasi perkemahan di Saemangeum. Dalam media interciw pertama setelah mereka menarik diri, perwakilan Inggris menyatakan kekecewaannya terhadap sistem organisasi dalam Jambore 2023 dan memberikan pernyataan resmi terkait kondisi acara yang tidak layak (Hall, 2023).

“As the event went on, we became more concerned about those conditions and that’s the reason why we took action before it became serious” – Chief Executive UK Scouts

Pemerintah Inggris mempertimbangkan untuk mengevakuasi peserta lebih awal karena kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan mereka. Tidak hanya itu, media Inggris turut memperkuat kritik dengan liputan yang menyoroti ketidaksiapan Korea Selatan sebagai tuan rumah.

Kontingen lain seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Australia menyusul Inggris untuk menarik kontingennya dari lokasi. Kontingen Amerika Serikat memutuskan keluar lebih awal dari lokasi Jambore karena kondisi cuaca ekstrem dan buruknya kondisi lokasi. Singapura juga termasuk negara yang menarik

kontingennya dari lokasi setelah muncul kekhawatiran mengenai kesehatan dan keselamatan peserta akibat panas ekstrem serta kondisi fasilitas yang dinilai tidak memadai

Media internasional memuat kesaksian pemimpin kontingen Swedia yang menganggap kondisi lokasi kacau. Mereka mengeluhkan kurangnya drainase, panas ekstrem, minimnya perlindungan dari matahari, hingga masalah makanan dan air minum. Beberapa peserta mengalami heatstroke dan dehidrasi.

Norwegia dan Denmark memindahkan peserta dari lokasi perkemahan di Saemangeum ke tempat yang lebih aman sebelum Topan Khanun tiba di Korea Selatan. Langkah ini menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap keselamatan peserta akibat cuaca ekstrem dan kondisi lokasi yang semakin memburuk. Selain itu, media Belgia menggambarkan Jambore 2023 sebagai *rampeneditie* atau “edisi bencana” karena berbagai permasalahan yang terjadi selama acara, seperti gelombang panas, buruknya pengelolaan acara, serta proses evakuasi akibat topan. Sementara itu, beberapa peserta dan pendamping dari Irlandia dan Kanada yang membagikan pengalaman mereka menyatakan bahwa kondisi di lokasi Jambore sangat berat, terutama terkait suhu panas ekstrem, fasilitas sanitasi, dan layanan kesehatan yang terbatas. Kritik dan respons dari berbagai negara tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan Jambore 2023 tidak hanya dipandang sebagai masalah domestik Korea Selatan, tetapi juga menjadi perhatian internasional yang memengaruhi reputasi negara tersebut sebagai tuan rumah acara global.

Respons negara-negara peserta tidak hanya berupa kritik terhadap penyelenggaraan acara, tetapi juga muncul dalam bentuk evaluasi dan

ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan. Banyak delegasi menilai bahwa fasilitas dan program yang disediakan tidak sebanding dengan biaya partisipasi yang telah dibayarkan, terutama karena berbagai masalah seperti cuaca ekstrem, sanitasi yang buruk, dan keterbatasan layanan kesehatan. Dalam konteks penyelenggaraan acara internasional, Olmos dkk (2020) menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara ekspektasi peserta dan kualitas layanan dapat memunculkan kritik serta tuntutan pertanggungjawaban terhadap penyelenggara.

2.3.3. Aspek Ekonomi dan Keuangan

Dari aspek ekonomi dan keuangan, Jambore Internasional 2023 memunculkan kritik terhadap pengelolaan anggaran, tambahan biaya penanganan darurat, serta menurunkan kepercayaan internasional terhadap kemampuan Korea Selatan dalam mengelola acara global. Penyelenggaraan Jambore mendapat kritik luas karena dianggap tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan. Media Korea dan internasional mempertanyakan penggunaan dana miliaran won karena fasilitas dasar seperti toilet, sanitasi, drainase, dan tempat berteduh dinilai sangat buruk. Laporan juga menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran justru digunakan untuk biaya operasional dan perjalanan dinas dibanding pembangunan infrastruktur utama acara (Cherrie, 2023).

Selain itu, Pemerintah Korea Selatan harus mengeluarkan biaya tambahan besar untuk evakuasi puluhan ribu peserta setelah Topan Khanun mendekat. Lebih dari 1.000 bus dikerahkan untuk memindahkan sekitar 37.000 peserta ke hotel,

universitas, dan fasilitas lain di Seoul serta berbagai wilayah lain. Pengeluaran mendadak ini meningkatkan beban biaya penyelenggaraan acara (Rashid, 2023).

Jambore diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi wilayah Saemangeum dan Jeolla Utara melalui sektor pariwisata, konsumsi peserta, dan promosi daerah. Namun, kegagalan acara justru menimbulkan kerugian reputasi yang mengurangi manfaat ekonomi yang diharapkan. (Rashid, 2023) Beberapa komentar publik bahkan menyebut bahwa acara tersebut berubah dari upaya promosi ekonomi menjadi sumber rasa malu nasional. Situasi tersebut memberikan kesan negatif pada tata kelola administrasi dan keuangan dalam penyelenggaraan Jambore Internasional 2023.

2.3.4. Aspek Reputasi Global

Permasalahan yang muncul dalam Jambore Internasional 2023 memengaruhi reputasi global Korea Selatan sebagai tuan rumah. Citra negara dalam menyelenggarakan acara internasional menjadi sorotan setelah berbagai permasalahan dalam Jambore ini terekspos secara luas oleh media internasional. Menurut Wu (2023), diplomasi publik dan komunikasi lintas negara memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat internasional terhadap suatu negara. Informasi yang disebarluaskan melalui media internasional dapat memengaruhi bagaimana publik global menilai citra, kebijakan, dan kredibilitas suatu negara. Luasnya pemberitaan media mengenai situasi yang muncul dalam Jambore Internasional 2023 berpotensi memberikan persepsi negatif terhadap Korea Selatan di mata global.

Media internasional melaporkan bahwa Jambore Internasional 2023 memicu rasa malu nasional dan merusak citra negara. *The Guardian* menulis bahwa media Korea menyebut Jambore sebagai "*national disgrace*" dan "*worst nightmare*" bagi Korea Selatan. Bahkan sejumlah warga Korea dilaporkan meminta maaf kepada peserta asing atas buruknya penyelenggaraan acara (Rashid, 2023). Jambore yang semula dirancang sebagai ajang promosi internasional Korea Selatan justru berubah menjadi krisis reputasi setelah berbagai negara mulai menarik kontingennya akibat masalah keselamatan dan fasilitas.

Kritik terhadap penyelenggaraan Jambore Internasional 2023 juga datang dari berbagai negara peserta yang merasa bahwa standar layanan yang diberikan jauh dari ekspektasi untuk acara berskala internasional. Tharp (2023) mengungkapkan bahwa berbagai permasalahan memicu liputan negatif internasional serta menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan Korea Selatan dalam menyelenggarakan acara global. Selain itu, beberapa negara, termasuk Inggris dan Amerika Serikat, memutuskan untuk memindahkan atau menarik kontingen mereka dari lokasi perkemahan karena alasan keselamatan peserta. Inggris secara terbuka menyatakan kekecewaan mereka atas buruknya manajemen acara, terutama terkait keselamatan dan kesejahteraan peserta. Respons tersebut tidak hanya merugikan citra penyelenggara, tetapi juga memperkuat persepsi negatif terhadap reputasi Korea Selatan sebagai tuan rumah acara internasional.

Selain pemberitaan di media konvensional, media sosial memainkan peran besar dalam membentuk opini publik terhadap Jambore Internasional 2023. Beberapa unggahan dari peserta yang mengeluhkan kondisi acara di Twitter,

Instagram, dan Reddit menjadi viral. Unggahan tersebut memperlihatkan kondisi perkemahan yang tidak layak, antrean panjang untuk mendapatkan makanan dan air bersih, serta kurangnya perlindungan dari cuaca panas ekstrem. Citra negatif yang tersebar luas ini berdampak langsung pada reputasi penyelenggara dan menciptakan tekanan bagi pemerintah Korea Selatan untuk memberikan respons atas berbagai keluhan tersebut.

Kepercayaan internasional terhadap kemampuan Korea Selatan dalam menyelenggarakan acara global juga mengalami penurunan. Kegagalan dalam penyelenggaraan Jambore 2023 dapat berdampak pada pencalonan Korea Selatan sebagai tuan rumah untuk acara-acara besar di masa mendatang. Masalah yang muncul dalam Jambore Internasional 2023 menimbulkan keraguan internasional terhadap kapasitas Korea Selatan dalam mengelola event global berskala besar. Padahal, acara ini awalnya diharapkan dapat memperkuat citra Korea Selatan menjelang pencalonan Expo Busan 2030. Sebaliknya, berbagai masalah yang muncul justru menimbulkan citra negatif yang berpotensi memengaruhi daya tarik investasi dan peluang penyelenggaraan acara internasional di masa depan. Citra sebagai negara dengan infrastruktur modern dan kemampuan manajerial yang kuat menjadi terguncang akibat kegagalan ini.

Secara keseluruhan, Jambore Internasional 2023 menimbulkan dampak reputasi yang signifikan, tidak hanya bagi penyelenggara, tetapi juga bagi Korea Selatan sebagai tuan rumah dan WOSM sebagai organisasi utama. Sorotan media internasional, kritik dari negara-negara peserta, dan viralnya keluhan di media sosial memperburuk citra acara ini di mata dunia. Kejadian ini menjadi pelajaran

penting bahwa pengelolaan acara internasional tidak hanya berdampak pada pengalaman peserta, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kepercayaan global dan posisi suatu negara dalam komunitas internasional. Evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana perbaikan dapat dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Analisis yang lebih mendalam diperlukan guna mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan acara berskala besar di masa depan, sehingga dapat memastikan kelancaran, keselamatan, serta keberlanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

2.4 Analisis dinamika penyelenggaraan Jambore Pramuka Dunia 2023 di Saemangeum, Korea Selatan

Analisis mendalam terhadap penyelenggaraan Jambore Internasional 2023 di Saemangeum, Korea Selatan, secara komprehensif mengidentifikasi serangkaian faktor multidimensional yang saling terkait dan berkontribusi secara signifikan terhadap kegagalan acara berskala internasional tersebut. Kegagalan ini bukanlah disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai kelemahan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan.

Buruknya manajemen risiko, ketidaksiapan infrastruktur dan logistik, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya sistem keamanan, pengelolaan keuangan yang tidak efektif, rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan, serta kegagalan komunikasi informasi mencerminkan adanya kelemahan struktural dalam tata kelola penyelenggaraan acara.

Permasalahan tersebut diperparah oleh pengelolaan keuangan yang tidak efektif serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga mencerminkan adanya kelemahan struktural dan manajerial dalam tata kelola penyelenggaraan acara. Interaksi antar faktor tersebut menciptakan efek domino yang menghambat kemampuan penyelenggara dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, dan pengalaman positif bagi peserta.

Secara keseluruhan, Jambore Pramuka Dunia 2023 mencerminkan adanya kelemahan dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan acara. Berbagai permasalahan tersebut tidak hanya memengaruhi pengalaman peserta, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap reputasi Korea Selatan seperti yang akan diuraikan pada sub-bab berikutnya.